

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 42 TAHUN 2006
TANGGAL : 26 DESEMBER 2006

BLUEPRINT JOGJA CYBER PROVINCE
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma manajemen pemerintahan, baik disebabkan oleh faktor lingkungan domestik maupun faktor lingkungan global. Dengan paradigma baru ini rakyat ditempatkan pada posisi utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan.

Jogja Cyber Province yang merupakan bentuk implementasi *Electronic Government (e-Government)* adalah inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya. Akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya semata tidaklah menjamin keberhasilan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, karena:

1. Konsep *Garbage-In Garbage-Out* dengan jelas menunjukkan bahwa secanggih apapun mekanisme pemrosesan, keluaran yang baik tidak dapat dihasilkan dari masukan yang buruk.
2. *Fool with a tool is still a fool* artinya teknologi informasi dan komunikasi jika digunakan tanpa dukungan pengetahuan yang cukup tidak akan memberikan hasil apa-apa.
3. Teknologi informasi dan komunikasi adalah alat yang memberikan banyak kemudahan, namun tidak mampu menjawab permasalahan secara *instan*.
4. Terdapat banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semata.

Meskipun secara formal implementasi *e-Government* telah dimulai sejak tahun 2003 yaitu bersamaan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, namun banyak **kesalahan persepsi** yang dialami oleh berbagai pihak terhadap inisiatif *e-Government*, di antaranya:

1. Pembangunan situs Web (*Web Site*) sering kali dianggap sebagai langkah awal menuju layanan pemerintah berbasis teknologi informasi (TI);
2. Layanan berbasis TI dapat menyelesaikan masalah efisiensi dan efektifitas kerja secara *instan*;
3. Masyarakat memerlukan layanan berbasis TI dengan teknologi terkini yang paling canggih;
4. Layanan pemerintah berbasis TI harus bersifat swalayan (*self-service*) khususnya dengan menggunakan Personal Computer (PC);
5. Komitmen lisan pimpinan dirasakan cukup untuk menjamin ketersediaan layanan yang berkesinambungan;

6. Harapan yang sangat tinggi (*over expectation*) bahkan terkesan futuristis terhadap layanan pemerintah berbasis TI;
7. Sistem Informasi Manajemen (SIM) atau aplikasi TI akan dengan sendirinya mendatangkan data yang berkualitas;
8. Layanan *e-Government* dibuat karena teknologinya telah tersedia atau karena unit kerja lain telah melakukan hal tersebut terlebih dahulu;
9. Layanan *e-Government* adalah tanggungjawab unit kerja TI;
10. Tidak diperlukan Manajemen Perubahan (*Change Management*) dalam pengembangan layanan berbasis TI;
11. Pembuatan rencana strategis (jangka pendek, menengah, dan panjang) dapat menjamin ketersediaan layanan yang berkesinambungan;
12. Pengumpulan data yang berkualitas dapat dilakukan dengan mudah dan tidak memerlukan biaya besar.

Untuk mengatasi kesalahan persepsi tersebut dan memudahkan implementasi *e-Government*, disusunlah *Jogja Cyber Province Blueprint* dengan titik berat pada *Digital Government Services (DGS)*. Pengembangan DGS adalah langkah awal untuk menuju *Jogja Cyber Province* sebagai inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing dalam rangka mewujudkan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan Jawa bagian Selatan maupun *Economic Hub* bagi propinsi lainnya di Indonesia. Makna pokok *Jogja Cyber Province Blueprint* yang dititikberatkan pada *Digital Government Services* adalah:

1. Cetak Biru (*Blueprint*) adalah panduan pengembangan layanan strategis yang mencakup aspek sumberdaya manusia dan organisasi (*people*), proses, dan teknologi.
2. Transformasi Layanan adalah kunci sukses pengembangan layanan dengan melakukan transformasi bertahap terhadap kecakapan sumberdaya manusia dan organisasi, perbaikan proses kerja, dan penerapan teknologi yang sesuai.
3. Layanan Strategis adalah layanan unggulan yang menjadi pembeda (*differentiator*) dengan daerah lain di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing. Layanan Strategis juga berfungsi sebagai pemercepat (*accelerator*) pencapaian tujuan.
4. Berorientasi masyarakat (*citizen centric*): adalah memberikan layanan bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing dan taraf hidup masyarakat.
5. Berbasis informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Jogja Cyber Province* Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah untuk mewujudkan:

1. Keselarasan, artinya menjamin inisiatif teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan organisasi;
2. Keterpaduan, artinya memfasilitasi kebutuhan keterpaduan informasi antar unit kerja;
3. Perubahan, artinya memfasilitasi dan mengelola perubahan yang akan terjadi;

4. *Time to market*, artinya mengurangi waktu, upaya dan biaya jangka panjang melalui rencana dan arahan yang jelas;
5. Konvergen, artinya layanan yang dikembangkan konvergen dengan perkembangan teknologi.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Jogja Cyber Province* Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk memberikan arahan strategis kepada jajaran pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta berbagai konsekuensinya.

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi gambaran ideal dalam RENSTRA pada tahun 2004 – 2008 yang berbunyi "Mantapnya Pemerintah Daerah yang katalistik dan mendukung terbentuknya masyarakat kompetitif", dalam implementasi/pengembangan *e-Government* dalam bentuk *digital government services* di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memposisikan masyarakat sebagai pelanggan (*customer*);
- b. Mengenal pelanggan dengan baik dan memberikan layanan berbasis pengetahuan yang sesuai dengan budaya pelanggan;
- c. Inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan dan mengantisipasi potensi masalah selanjutnya;
- d. Inovasi untuk memperbaiki dan mengubah proses kerja agar dapat terus menerus meningkatkan kepuasan pelanggan;
- e. Memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumberdaya dan organisasi penyedia layanan;
- f. Mendekatkan produk dan layanan kepada masyarakat;
- g. Memanfaatkan *Information and Communication Technology* (ICT) yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, bukan untuk kepentingan pemerintah.

Kesemua kebijakan sebagaimana disebutkan di atas dikemas dalam bentuk *Digital Government Services (DGS)* Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menuju *Jogja Cyber Province*.

B. Strategi

Banyak sekali inovasi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan jenis layanan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Inovasi-inovasi inilah yang dijadikan landasan perubahan atau transformasi layanan bagi masyarakat. Beberapa inovasi yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi yang dipunyai dan diperkirakan dapat menjadi akselerator pencapaian tujuan. Untuk itu, maka dipilih 6 (enam) bidang unggulan yang meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- c. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang Pertanian;

- e. Bidang Perikanan dan Kelautan;
- f. Bidang Perhubungan.

Bidang-bidang unggulan ini akan selalu bertambah seiring dengan perjalanan waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. METODE PEMILIHAN LAYANAN *DIGITAL GOVERNMENT SERVICES* MENUJU *JOGJA CYBER PROVINCE*

Jogja Cyber Province adalah model propinsi yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah propinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.

Pengembangan *Jogja Cyber Province* dipicu oleh berkembangnya aspirasi masyarakat yang antara lain berupa tuntutan untuk:

1. Menjawab permasalahan atau kesulitan masyarakat baik secara individu ataupun kolektif;
2. Mendapatkan pelayanan yang mudah serta handal;
3. Mendapatkan pelayanan yang konsisten dan transparan;
4. Berinteraksi dengan pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kemampuan ekonomi;
5. Melalui pemerintah menjangkau peluang pengembangan potensi dan pemberdayaan secara lebih luas;
6. Mendapatkan kepastian hukum;
7. Menikmati pajak yang dibayarkan.

Untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Metode yang digunakan untuk menentukan layanan yang tepat bagi tuntutan masyarakat tersebut adalah metode 7 (tujuh) lapis keselarasan TI dan Organisasi dan metode penentuan kategori inisiatif unggulan.

A. Metode 7 (tujuh) Lapis Keselarasan Teknologi Informasi dan Organisasi

Kerangka Keselarasan (*Alignment Framework*) merupakan pondasi kerangka berpikir yang digunakan dalam pengembangan *blueprint* ini. Dengan menggunakan kerangka ini layanan Teknologi Informasi (TI) hanya akan dikembangkan untuk mendukung tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tercapai keselarasan antara tujuan organisasi dan arah pengembangan layanan TI dan konsekuensi yang ditimbulkan (misalnya biaya, perubahan organisasi, penambahan atau pengurangan sumberdaya manusia, dan lain sebagainya).

Kerangka Keselarasan ini membantu kedua belah pihak, yaitu organisasi secara umum dan penyedia atau pengelola layanan TI agar dapat berinteraksi secara lebih sehat dan terarah.

Banyak kegagalan pengembangan layanan TI baik di sektor swasta atau publik yang disebabkan karena adanya jurang kesenjangan yang besar antara tujuan organisasi dan pemahaman penyedia atau pengelola layanan TI. Hal ini terjadi karena organisasi tidak mampu mengartikulasikan tujuan, strategi, inisiatif, aktifitas, dan kapabilitas yang diperlukan atau dikehendaki secara rinci. Sedangkan pihak penyedia atau pengelola layanan TI tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai untuk menterjemahkan kehendak organisasi keseluruhan.

Kerangka 7 (tujuh) Lapis Keselarasan TI dan Organisasi ini memiliki dua area (*domain*) utama, yaitu:

1. **Domain Organisasi:** adalah area yang sepenuhnya merupakan tugas organisasi pada umumnya, khususnya para pemilik proses kerja.

Pada area inilah organisasi atau para pemilik proses kerja untuk mengurai tujuan, strategi, inisiatif, aktifitas dan kapabilitas yang diperlukan. Namun walaupun area ini merupakan wilayah kerja organisasi atau para pemilik proses kerja, keterlibatan penyedia atau pengelola layanan TI juga tidak dapat dikesampingkan karena sejalan dengan perkembangan TI banyak sekali proses kerja, strategi, inisiatif, aktifitas, dan kapabilitas yang dapat memanfaatkan layanan TI. Secara rinci 5 (lima) lapis keselarasan yang terdapat dalam domain organisasi adalah sebagai berikut:

- a. **Tujuan:** mendiskripsikan tujuan yang ingin dicapai oleh unit organisasi.
- b. **Strategi:** strategi unit organisasi yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang tingkat keberhasilannya dapat diukur dalam merealisasikan tujuan;
- c. **Inisiatif:** inisiatif yang dikerjakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Strategi dilaksanakan, diarahkan, dan dikomunikasikan melalui inisiatif;
- d. **Aktifitas:** kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada setiap inisiatif. Inisiatif memerlukan aktifitas baru, memperbaiki aktifitas lama, atau menghilangkan aktifitas yang tidak sesuai guna mencapai hasil yang diharapkan;
- e. **Kapabilitas:** kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan atau mendukung setiap aktifitas.

2. **Domain TI:** adalah area kerja penyedia atau pengelola layanan TI.

Pada area ini, informasi organisasi atau proses kerja diterjemahkan ke dalam bentuk layanan TI yang kemudian ditentukan komponen teknologi pendukung yang sesuai. . Secara rinci 2 (dua) lapis keselarasan yang terdapat dalam domain TI adalah sebagai berikut:

- a. **Layanan TI:** memilih/menetapkan layanan TI yang dapat menyediakan kapabilitas yang dikehendaki. Memilih/menetapkan layanan TI baru yang diperlukan untuk mendukung kapabilitas.
- b. **Teknologi:** memilih/menetapkan teknologi yang tepat dan diperlukan untuk mendukung layanan TI tersebut dan cara-cara memelihara, mengembangkan, dan mengelola teknologi tersebut.

Dengan terciptanya keselarasan ini maka pengembangan layanan TI diharapkan tepat sasaran sesuai dengan tujuan organisasi dan konsekuensi yang ditimbulkan dapat dikelola dengan baik.

B. Metode Penentuan Kategori Inisiatif Unggulan

Tidak seluruh inisiatif dapat dikategorikan sebagai inisiatif unggulan atau strategis. Kategori inisiatif yang digunakan sebagai acuan baku adalah sebagai berikut:

1. **Strategic:** adalah inisiatif yang sangat penting untuk menunjang kelanjutan tugas organisasi dan mampu menunjang pencapaian strategi yang akan datang. Inisiatif ini bercirikan inovasi dan membawa perubahan mendasar.
2. **High Potential:** adalah inisiatif yang berpeluang untuk dikembangkan guna mencapai tujuan organisasi masa datang.
3. **Key Operational:** adalah inisiatif yang pada saat ini dijalankan dan sukses organisasi tergantung kepadanya. Inisiatif ini bercirikan efektifitas, keterpaduan, dan pederhanaan proses.

4. **Support:** adalah inisiatif yang penting namun tidak menjadi penentu keberhasilan organisasi. Inisiatif ini bercirikan efisiensi, pengurangan proses, dan pengurangan biaya.

IV. BIDANG UNGGULAN *JOGJA CYBER PROVINCE BLUEPRINT*

Jogja Cyber Province Blueprint adalah cetak biru (*Blueprint*) program transformasi layanan strategis Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berorientasi masyarakat (*citizen centric*) dengan berbasis pada proses bisnis, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah propinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif. Program transformasi layanan ini adalah kelanjutan dari Program Transformasi Birokrasi yang telah dicanangkan sebelumnya.

Berbeda dengan pengembangan layanan TI atau SIM (Sistem Informasi Manajemen) pada umumnya, pengembangan layanan strategis ini direncanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan proses dan metode inovatif guna menjamin kesinambungan dan kualitas layanan yang diberikan.

Mengingat bidang unggulan yang harus dikerjakan demikian banyaknya apabila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang tersedia di Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu disusun *road map* kegiatan DGS tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang disesuaikan dengan tingkat prioritas pengembangan dari masing-masing bidang unggulan. Adapun uraian masing-masing bidang unggulan secara rinci adalah sebagai berikut.

A. Bidang Pendidikan

1. Implementasi DGS pada bidang pendidikan ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain berupa:
 - a. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi.
 - b. Belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga kependidikan.
 - c. Kurangnya jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.
 - d. Belum mantapnya sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
 - e. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah.
 - f. Belum mantapnya penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
 - g. Belum optimalnya kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
 - h. Belum terselenggarakannya secara memadai pengembangan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh.
 - i. Belum optimalnya keterpaduan program pembangunan bidang pendidikan dengan bidang lain.

2. Layanan unggulan bidang Pendidikan 2006 adalah *DIY Learning Gateway*

Berdasarkan hasil analisis berbagai sumber informasi, telah dilakukan penyesuaian terhadap nominasi layanan unggulan bidang pendidikan, dimana inisiatif *Smart School* dipertajam menjadi inisiatif *Learning Gateway*, sedangkan inisiatif *Regional Digital Library Network* dipisahkan menjadi inisiatif tersendiri mengingat kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun 2005. Namun walaupun begitu, inisiatif *Regional Digital Library Network* ini tetap menjadi bagian dari program peningkatan kualitas pendidikan.

- 3. Layanan DIY Learning Gateway memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:**
- a. Pemerintah (dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) menyediakan layanan pembelajaran tanpa biaya melalui pemanfaatan ICT (baik *on-line* maupun *off-line*).
 - b. Layanan unggulan “*DIY Learning Gateway*” atau “Gerbang Pembelajaran” Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapat kesempatan menikmati pendidikan yang baik (khususnya tingkat dasar, menengah dan pendidikan luar sekolah), memberikan fasilitas bagi para guru untuk mengembangkan profesinya serta memberikan fasilitas kepada semua insan pendidikan (orang tua/wali murid, dewan pendidikan, praktisi, dan sebagainya) untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Manfaat Area Transformasi *DIY Learning Gateway***
- a. Memberikan kesempatan kepada pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk terus belajar di luar jam sekolah dengan memanfaatkan beragam media akses seperti Internet (Warnet, Warnet Keliling), Telepon dan SMS.
 - b. Media pertukaran dan berbagi materi pembelajaran bagi sekolah dan lembaga pendidikan.
 - c. Menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan bagi sekolah dan lembaga pendidikan di daerah.
 - d. Gerbang Pembelajaran sebagai sekolah maya (*virtual*) yang melibatkan interaksi aktif orang tua, siswa dan guru.
 - e. Mengembangkan potensi komunitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran secara umum dan guru mata pelajaran pada khususnya.
- 5. Area Transformasi Pelayanan**
- a. Produk layanan baru.
 - b. Pemerintah secara langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati materi pembelajaran dari berbagai sumber.
 - c. Pemerintah (Dinas Pendidikan) sebagai penyelenggara layanan pembelajaran maya (*virtual*).
- 6. Akselerasi Penyelesaian Masalah**
- a. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi.
 - b. Belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga kependidikan.
 - c. Kurangnya jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.
 - d. Belum mantapnya sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
 - e. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah.
 - f. Belum mantapnya penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
 - g. Belum optimalnya kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
 - h. Belum terselenggarakannya secara memadai pengembangan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh.
 - i. Belum optimalnya keterpaduan program pembangunan bidang pendidikan dengan bidang lain.

B. Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

1. Implementasi *DGS* pada bidang Perindustrian, perdagangan, dan koperasi ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain berupa:
 - a. Rendahnya pengembangan inovasi teknologi di perusahaan industri kecil.
 - b. Belum optimalnya peran Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), sehingga upaya untuk pengembangan produk/proses produksi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
 - c. Rendahnya pengetahuan dan motivasi pelaku industri dalam penerapan industri berwawasan lingkungan.
 - d. Kurangnya wawasan para pengusaha UKM dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual, hal ini akan berakibat kurangnya apresiasi terhadap perkembangan produk-produk UKM.
 - e. Rendahnya kesadaran produsen/pedagang terhadap peraturan dan kebijaksanaan pemerintah khususnya perdagangan dalam negeri.
 - f. Belum adanya kesadaran secara menyeluruh penggunaan Ukuran Timbangan, Takaran, dan Perlengkapan (UTTP) oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - g. Belum mampu merespon perkembangan teknologi yang pesat dan perkembangan pasar yang dinamis, meskipun sumberdaya manusia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mempunyai kemampuan adaptasi teknologi yang cukup tinggi.
 - h. Kurang dikenalnya produk kerajinan secara meluas di pasaran karena dari satu sisi pelaku ekspor masih kurang menyadari akan pentingnya promosi, di sisi lain biaya promosi masih dirasa cukup tinggi.
 - i. Lemahnya penguasaan informasi.
 - j. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama pelaku eksportir UKM, menyebabkan lemahnya *bargaining position* (posisi tawar) untuk menghadapi mitra bisnisnya.

2. Layanan Unggulan Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 2006 adalah *DIY Small and Medium Business Center*

Layanan *DIY Small and Medium Business Center* ini memiliki karakteristik dasar sebagai berikut

- a. Pemerintah memberdayakan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan bertindak sebagai mediator atau konsultan bisnis yang menggerakkan sendi-sendi bidang industri, perdagangan dan koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Mediator yang direpresentasikan oleh Dinas INDAGKOPTAMBEN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui layanan *DIY Small and Medium Business Development Center* ini akan memiliki kemampuan menarik dunia usaha (investor, pembeli, distributor, retailer, dll) dan memiliki kemampuan mendorong UKMK untuk cepat tanggap terhadap dinamika bisnis.
- c. Konsep pelayanan dan pemberdayaan UKMK Satu Atap, tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, namun diberikan melalui satu kesatuan sistem (*One Roof by Systems*). Hal ini memungkinkan UKMK untuk mendapatkan pelayanan dan informasi yang handal dan konsisten dari berbagai institusi terkait.

- d. *One Roof by Systems* pada dasarnya memperbanyak jalur pelayanan (*service channels*) untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai mediator bisnis.
- e. Dengan konsep ini maka pemerintah akan mampu mendapatkan profile UKMK yang menyeluruh (*360° customer view*) yang pada gilirannya memberikan kemampuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan program kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan UKMK.

2. Manfaat Area Transformasi *DIY Small and Medium Business Center* :

- a. Memberikan layanan konsultasi bidang industri, perdagangan, dan kopoperasi berbasis pengetahuan yang memadai dengan dukungan TI.
- b. Menerapkan konsep *Customer Relationship Management* guna mempertajam hubungan antara pemerintah dengan pengusaha.
- c. *UKMK Dashboard* – sebagai cermin bagi para pengusaha untuk mengukur unjuk kerja, keunggulan, kelemahan dan potensi.
- d. *Instant Promotion* – memberikan fasilitas bagi UKMK untuk melakukan promosi berbiaya rendah namun tepat sasaran.
- e. Memberikan analisa potensi pasar kepada pihak terkait, khususnya lembaga keuangan guna meningkatkan arus kapital kepada pengusaha dan koperasi.
- f. Menyediakan layanan pelatihan *on-call basis* atau *on-line*.
- g. Respon yang tepat terhadap perubahan situasi pasar.

3. Area Transformasi Pelayanan

- a. Pemerintah sebagai konsultan bisnis.
- b. Penerapan konsep *Customer Relationship Management (Know, Profile, Engage, Retain, Upgrade)*.
- c. Analisa pasar berbasis data (*Business Intelligent*).
- d. Diversifikasi media pelayanan *on-site*, *on-call* dan *on-line/batch*.

4. Akselerasi Penyelesaian Masalah

- a. Rendahnya pengembangan inovasi teknologi di perusahaan industri kecil.
- b. Belum optimalnya peran Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), sehingga upaya untuk pengembangan produk/proses produksi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- c. Rendahnya pengetahuan dan motivasi pelaku industri dalam penerapan industri berwawasan lingkungan.
- d. Kurangnya wawasan para pengusaha UKM dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual, hal ini akan berakibat kurangnya apresiasi terhadap perkembangan produk-produk UKM.
- e. Rendahnya kesadaran produsen/pedagang terhadap peraturan dan kebijaksanaan pemerintah khususnya perdagangan dalam negeri.
- f. Belum adanya kesadaran secara menyeluruh penggunaan Ukuran Timbangan, Takaran, dan Perlengkapan (UTTP) oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Belum mampu merespon perkembangan teknologi yang pesat dan perkembangan pasar yang dinamis, meskipun sumberdaya manusia di Propinsi DIY cenderung mempunyai kemampuan adaptasi teknologi yang cukup tinggi.

- h. Kurang dikenalnya produk kerajinan secara meluas di pasaran karena pelaku ekspor masih kurang menyadari akan pentingnya promosi, di sisi lain biaya promosi masih dirasa cukup tinggi.
- i. Lemahnya penguasaan informasi.
- j. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama pelaku eksportir UKM, menyebabkan lemahnya *bargaining position* untuk menghadapi mitra bisnisnya.

C. Bidang Pariwisata

1. Implementasi *DGS* pada bidang Pariwisata ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain berupa:

- a. Koordinasi program antar kabupaten/kota dengan Propinsi dalam rangka optimalisasi obyek wisata tidak intensif.
- b. Dukungan program pengembangan pariwisata lintas sektor belum terwujud.
- c. Promosi terpadu (kab/kota dan pelaku pariwisata) belum terarah pada segmen kunci publikasi.
- d. Pelaku pariwisata terjebak pada aspek resiko, bila akan menawarkan paket tour yang baru.
- e. Jaminan hukum terhadap Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah belum terkoordinasi dengan baik.
- f. Komunikasi antara pemerintah dengan pelaku pariwisata dalam rangka penyamaan persepsi pengembangan pariwisata tidak teragendakan secara kontinyu.

2. Layanan Unggulan Bidang Pariwisata 2007 adalah *DIY Tourism Promo Center*

Layanan *DIY Tourism Promo Center* ini memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:

- a. Pemerintah merangsang pertumbuhan industri pariwisata dengan bertindak sebagai *Center Marketing Organization (CMO)* pada bidang pariwisata. *CMO* yang direpresentasikan oleh Badan Pariwisata Daerah (BAPARDA) DIY memberikan layanan kepada pelaku bisnis untuk mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan efektifitas kegiatan pemasaran pariwisata.
- b. Konsep *Just In Time Promotion* yang akan diterapkan oleh BAPARDA akan sangat membantu pelaku industri dalam menentukan strategi pemasaran dan menentukan sasaran pasar yang tepat dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih rendah. Pada gilirannya seluruh upaya pemasaran destinasi DIY merupakan kegiatan yang terkoordinasi dan saling bersinergi.

3. Manfaat Area Transformasi *DIY Tourism Promo Center*

- a. Melakukan analisa pasar (*supply, demand, pricing*) untuk melakukan promosi terarah (*targeted promotion*).
- b. Memberikan hasil analisa pasar, *forecast* dan rekomendasi secara regular (minimal 3 bulan) kepada pelaku industri pariwisata guna menurunkan biaya dan waktu riset pasar.
- c. Menyediakan atau memfasilitasi media dan sarana promosi bagi pelaku industri pariwisata melalui Internet (*Web Site, Push Mail, Internet Ad*), *Push SMS* atau *Call Center*.

- d. *Instant Brochure* – memberikan fasilitas bagi pelaku industri pariwisata untuk membuat sarana promosi secara instant.
- e. Memberikan rekomendasi pengembangan dan penguatan produk bagi Kabupaten/Kota dan pelaku industri pariwisata berbasis analisa pasar dan pelanggan.
- f. Responsif terhadap perubahan minat atau *trend* akibat perubahan situasi regional atau global.

4. Area Transformasi Pelayanan

- a. Pemerintah sebagai *Center Marketing Organization (CMO)*.
- b. Analisa pasar berbasis data (*Business Intelligent*).
- c. Kerjasama antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota.
- d. Peningkatan keintiman (*intimacy*) dengan pelanggan (wisatawan).

5. Akselerasi Penyelesaian Masalah

- a. Koordinasi program antar kabupaten/kota dengan Propinsi dalam rangka optimalisasi obyek wisata tidak intensif.
- b. Dukungan program pengembangan pariwisata lintas sektor belum terwujud.
- c. Promosi terpadu (kab/kota dan pelaku pariwisata) belum terarah pada segmen kunci publikasi.
- d. Pelaku pariwisata terjebak pada aspek resiko, bila akan menawarkan paket tour yang baru.
- e. Jaminan hukum terhadap Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah belum terkoordinasi dengan baik.
- f. Komunikasi antara pemerintah dengan pelaku pariwisata dalam rangka penyamaan persepsi pengembangan pariwisata tidak teragendakan secara kontinyu.

D. Bidang Pertanian

1. Implementasi *DGS* pada bidang Pertanian ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain berupa:
 - a. Masih rendahnya akses petani/nelayan terhadap posisi tawar, informasi pasar, teknologi, dan permodalan.
 - b. Sempitnya luas kepemilikan tanah dan bergesernya penggunaan lahan pertanian ke non pertanian.
 - c. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan sebagian besar tenaga kerja pertanian.
 - d. Belum profesionalnya kelembagaan tani.
 - e. Belum terjaminnya kuantitas dan kualitas produk komoditas pertanian sehingga berpengaruh pada pemasaran hasil.
 - f. Semakin berkurangnya tenaga muda produktif di pedesaan.
 - g. Terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul yang berkualitas.
 - h. Terbatasnya penyediaan hijauan makanan ternak (HMT) di tempat sentra produksi ternak.
 - i. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian.

- j. Penggunaan pupuk kimia yang tidak seimbang dan berlebihan akan menurunkan daya dukung lahan.
- k. Pelaksanaan kegiatan dalam sub sistem agribisnis belum dapat diformulasikan secara baik agar saling terkait dan mendukung.

2. Layanan Unggulan Bidang Pertanian 2007 adalah *DIY Agri Center*

Layanan *DIY Agri Center* ini memiliki karakteristik dasar sebagai berikut

- a. Pemerintah menjadi pengarah mata rantai asupan (*Supply Chain*) bidang agribisnis. Dinas Pertanian yang menyelenggarakan layanan ini melalui *DIY Agri Center* memperluas tugas dan fungsinya untuk merangkul seluruh elemen Agribisnis dalam satu kegiatan *Supply Chain Management* yang baik.
- b. Kegiatan ini menuntut kesiapan dan kemampuan produksi petani, meningkatkan aksesibilitas pelaku bisnis (*wholesalers, retailer, eksportir, produsen, konsumen*) kepada produk dan peluang usaha, ketersediaan modal serta efektifitas dan efisiensi jalur distribusi komoditas.
- c. Selain itu, *DIY Agri Center* juga menjadi pusat pengembangan usaha perbenihan *DIY (Seed Center)* yang diharapkan akan menjadi primadona usaha pertanian (dan perikanan budidaya) dalam waktu yang tidak lama lagi.
- d. *DIY Agri Center* juga menerapkan konsep *One Roof by Systems* yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan kepada seluruh elemen rantai asupan ini dapat diberikan oleh berbagai institusi terkait, demikian pula akses dan distribusi penjualan benih dapat dilakukan pada berbagai tempat.

3. Manfaat Area Transformasi *DIY Agri Center*

- a. Memberikan layanan konsultasi Agribisnis berbasis pengetahuan yang memadai dengan dukungan TI
- b. Membantu petani/kelompok tani melakukan forecasting dan planning dalam menentukan pola tanam, harga dan pasar
- c. Menyediakan fasilitas pemesanan dan transaksi produk pendukung industri pertanian seperti pupuk dan benih (*Seed Center*). Pemesanan dapat dilakukan melalui kehadiran (*on-site ordering*), telepon (*on-call ordering*) atau Internet (*on-line ordering/batch ordering*)
- d. Menyediakan layanan pelatihan *on-call* basis atau *on-line*
- e. Memberikan analisa potensi pasar kepada pihak terkait, khususnya lembaga keuangan guna meningkatkan arus kapital kepada petani dan pengusaha bidang pertanian
- f. Memperkuat pelayanan Sub-Terminal Agribisnis (STA) dan Klinik konsultasi Agribisnis dengan TI (berupa layanan informasi dan transaksi – *on-line* maupun *off-line*)
- g. Respon yang tepat terhadap perubahan situasi pasar

4. Area Transformasi Pelayanan

- a. Pemerintah sebagai konsultan bisnis
- b. Pemerintah sebagai mediator transaksi
- c. Analisa pasar berbasis data (*Business Intelligent*)
- d. Penerapan konsep *Supply Chain Management*
- e. Diversifikasi media pelayanan *on-site, on-call* dan *on-line/batch*

E. Bidang Perikanan dan Kelautan

1. Implementasi *DGS* pada bidang Perikanan dan Kelautan ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain berupa:
 - a. Banyaknya lahan perairan yang belum optimal pengelolaannya terutama pengelolaan laut dan pesisir termasuk peraturan yang mendukung kegiatan tersebut.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terutama dalam hal perikanan tangkap dan budidaya tambak ikan/udang.
 - c. Terbatasnya ketersediaan benih ikan sesuai dengan permintaan seperti jumlah, jenis, mutu, ukuran, waktu, harga dan tempat.
 - d. Belum adanya dermaga pelabuhan yang memadai sebagai tempat berlabuh kapal-kapal besar, untuk mendukung tidak adanya *over fishing* di Jalur I.
 - e. Pelaku pembangunan perikanan masih banyak yang merupakan nelayan/petani ikan tradisional dan usaha yang dijalankannya masih merupakan mata pencaharian sampingan.
 - f. Belum memadainya ketersediaan data akurat dan sistem informasi di tingkat lapangan.
 - g. Terbatasnya akses pasar domestik lokal, regional dan internasional.
 - h. Belum adanya pengawasan yang baik terhadap masuknya ikan konsumsi dari luar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Layanan Unggulan Bidang Perikanan dan Kelautan 2007 adalah *DIY Fishery Business Center*

Layanan *DIY Fishery Business Center* ini memiliki karakteristik dasar sebagai berikut :

- a. Pada bidang Perikanan dan Kelautan, pemerintah juga menjadi pengarah mata rantai asupan (*Supply Chain*) bidang perikanan dan kelautan.
- b. Melalui layanan *DIY Fishery Business Center* Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah menyediakan infrastruktur usaha perikanan dan kelautan (tidak hanya berupa informasi) guna menjamin keseimbangan asupan, misalnya dengan membangun infrastruktur komunikasi dasar pada seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar diberbagai lokasi agar tidak terjadi ketimpangan antara *supply* dan *demand*, menyediakan layanan pendingin bergerak (*Mobile Chiller*) guna meningkatkan mobilitas komoditas tanpa mengorbankan kualitasnya, membangun infrastruktur pencitraan jarak jauh (*Remote Sensing*) untuk meningkatkan produktifitas nelayan dalam bekerja.
- c. Serupa dengan layanan *DIY Agri Center*, *DIY Fishery Business Center* ini juga mengembangkan usaha perbenihan (*Seed Center*) khususnya untuk komoditas calon benih unggulan.
- d. *DIY Fishery Business Center* menerapkan konsep *One Roof by Systems* yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan kepada seluruh elemen rantai asupan ini dapat diberikan oleh berbagai institusi terkait, demikian pula akses dan distribusi penjualan benih dapat dilakukan pada berbagai tempat.

3. Manfaat Area Transformasi *DIY Fishery Business Center*

- a. Memberikan layanan konsultasi bidang Perikanan dan Kelautan berbasis pengetahuan yang memadai dengan dukungan TI.
- b. Penerapan teknologi *remote sensing*.
- c. Penerapan teknologi *mobile cooler* guna meningkatkan mobilitas produk tanpa mengorbankan kualitas.
- d. Menyediakan fasilitas pemesanan dan transaksi benih perikanan budidaya. Pemesanan dapat dilakukan melalui kehadiran (*on-site ordering*), telepon (*on-call ordering*) atau Internet (*on-line ordering/batch ordering*).
- e. *Real-time Demand and Supply* - Membangun jejaring informasi dengan pasar dalam dan luar negeri.
- f. Memperkuat pelayanan pada tingkat Depot (di Kabupaten) dengan TI (berupa layanan informasi dan transaksi – *on-line* maupun *off-line*).
- g. Memberikan analisa potensi pasar kepada pihak terkait, khususnya lembaga keuangan guna meningkatkan arus kapital dan potensi konsumsi.
- h. Menyediakan layanan pelatihan *on-call basis* atau *on-line*.
- i. Respon yang tepat terhadap perubahan situasi pasar.

4. Area Transformasi Pelayanan

- a. Pemerintah sebagai konsultan bisnis.
- b. Penerapan konsep *Supply Chain Management*.
- c. Analisa pasar berbasis data (*Business Intelligent*).
- d. Diversifikasi media pelayanan *on-site*, *on-call* dan *on-line/batch*.

5. Akselerasi Penyelesaian Masalah

- a. Banyaknya lahan perairan yang belum optimal pengelolaannya terutama pengelolaan laut dan pesisir termasuk peraturan yang mendukung kegiatan tersebut.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana terutama dalam hal perikanan tangkap dan budidaya tambak ikan/udang.
- c. Terbatasnya ketersediaan benih ikan sesuai dengan permintaan seperti jumlah, jenis, mutu, ukuran, waktu, harga dan tempat.
- d. Belum adanya dermaga pelabuhan yang memadai sebagai tempat berlabuh kapal-kapal besar, untuk mendukung tidak adanya *over fishing* di Jalur I.
- e. Pelaku pembangunan perikanan masih banyak yang merupakan nelayan/petani ikan tradisional dan usaha yang dijalankannya masih merupakan mata pencaharian sampingan.
- f. Belum memadainya ketersediaan data akurat dan sistem informasi di tingkat lapangan.
- g. Terbatasnya akses pasar domestik lokal, regional dan internasional.
- h. Belum adanya pengawasan yang baik terhadap masuknya ikan konsumsi dari luar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Bidang Perhubungan

1. Implementasi *DGS* pada bidang Perhubungan ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain berupa:

- a. Masih rendahnya kualitas pegawai dan kemampuan PPNS.
- b. Masih lemahnya komunikasi dan koordinasi.
- c. Terbatasnya pelayanan data dan informasi perhubungan, termasuk pelayanan melalui media elektronik.
- d. Tertib lalu lintas dan penegakan supremasi hukum :
 - 1) Lemahnya pengawasan, pengendalian, dan penertiban angkutan umum dan telekomunikasi.
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kendaraan patroli dan pengawalan.
 - 3) Terbatasnya pembinaan disiplin pegawai, penyuluhan keselamatan perlintasan jalan dengan rel kereta api, dan keselamatan pelayaran.
 - 4) Terbatasnya areal lahan untuk menunjang operasional jembatan timbang.
- e. Belum berkembangnya Bandara Adi Sutjipto dan Lapangan Terbang Gading :
 - 1) Terbatasnya areal parkir dan belum tersedia *detail engineering* yang menunjang untuk pengembangan Bandara Adi Sutjipto.
 - 2) Belum berkembangnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pihak Angkasa Pura dan TNI AU.
 - 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana lapangan Gading yang mendukung kegiatan latihan TNI AU.
- f. Belum tersedianya lampu penerangan jalan di kawasan wisata Kraton dan Paku Alaman.
- g. Sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, pelayaran, dan udara, serta telekomunikasi.

2. Layanan Unggulan Bidang Perhubungan 2007 adalah *DIY Integrated Transportation Information Center*

Layanan *DIY Integrated Transportation Information Center* ini memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:

- a. Pemerintah menciptakan iklim mobilitas yang efisien, aman dan nyaman guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Dinas Perhubungan Propinsi DIY sebagai fasilitator utama dalam hal ini menyelenggarakan layanan informasi transportasi sebagai awal dari pengembangan *Traffic Management and Control Systems* di kemudian hari. Dengan tersedianya informasi transportasi terpadu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas mobilitas masyarakat dan dunia usaha.

3. Manfaat Area Transformasi *DIY Integrated Transportation Information Center*

- a. Memfasilitasi layanan *e-ticketing* bagi masyarakat.
- b. Memanfaatkan teknologi *Global Positioning System* (GPS) guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara (pribadi maupun operator) – khususnya untuk menghindari kemacetan yang berakibat kepada kerugian ekonomis.
- c. *Traffic Control Center* – Pusat pengendalian dan monitoring lalu lintas.
- d. *Trip Planner* – memberikan rekomendasi pilihan *multi-moda* yang terintegrasi dengan pilihan operator, waktu tempuh dan biaya yang beragam.
- e. *Tracking, Tracing and Monitoring Domestic Product Movement* – memantau pergerakan produk domestik guna menghindari gangguan pada mata rantai asupan (*Supply Chain*).

4. Area Transformasi Pelayanan

- Diversifikasi media pelayanan *on-site*, *on-call* dan *on-line/batch*.
- Menjadi tulang punggung kegiatan *Supply Chain Management*.
- Pemerintah sebagai fasilitator *transaksi*.

5. Akselerasi Penyelesaian Masalah

- Masih rendahnya kualitas pegawai dan kemampuan PPNS
- Masih lemahnya komunikasi dan koordinasi.
- Terbatasnya pelayanan data dan informasi perhubungan, termasuk pelayanan melalui media elektronik.
- Tertib lalu lintas dan penegakan supremasi hukum.
- Belum berkembangnya Bandara Adi Sucipto dan Lapangan Terbang Gading.
- Belum tersedianya lampu penerangan jalan di kawasan wisata Kraton dan Paku Alaman.
- Sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, pelayaran, dan udara, serta telekomunikasi.

V. FRAMEWORK DIGITAL GOVERNMENT SERVICES



A. Framework Digital Government Services - Landasan Kerja

Landasan Kerja *Digital Government Services* adalah sebagai berikut:

- Sasaran dan Komitmen (berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan pelanggan).
- Pembiayaan yang memadai dan berkesinambungan.

3. Kompetensi sumberdaya dan fungsi Organisasi yang bersinergi (*cross-functioned*).
4. Orkestrasi proses kerja prima yang berorientasi pelanggan dan berbasis pengetahuan.
5. Kebijakan, Perundangan, Standar dan Pengukuran.
6. Ketersediaan Data Primer - Masalah ketersediaan data hendaknya diangkat menjadi masalah strategis yang dikaitkan langsung dengan kemampuan bersaing daerah, pembangunan ekonomi, serta keamanan regional dan nasional.
7. Tanpa mengangkat ketersediaan data menjadi hal yang strategis akan mustahil bagi Pemerintah Propinsi DIY untuk melaksanakan DGS ini.

Landasan Kerja ini jika dapat dibangun dengan baik dan dijalankan secara konsisten sudah dapat membawa perubahan positif yang signifikan terhadap pola budaya kerja. Akan tetapi perubahan tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan regional maupun global yang begitu dinamis.

B. Framework Digital Government Services - Pilar Percepatan

Untuk itu diperlukan Pilar Percepatan yang berbasis Teknologi Informasi sebagai akselerator pencapaian tujuan. Pilar Percepatan tersebut terdiri dari:

1. **Layanan Unggulan (Strategis)** adalah layanan pemerintah unggulan (strategis) sebagai akselerator pencapaian tujuan. Layanan unggulan sarat dengan inovasi atau hal baru yang bernilai tambah kepada pelayanan yang telah ada pada saat ini, misalnya untuk mempercepat proses, mengakselerasi pertumbuhan, mengurangi biaya, meningkatkan keluaran.
2. **Layanan Operasional** adalah proses atau fasilitas untuk melayani kebutuhan masyarakat secara luas, misalnya fasilitas perijinan, konsultasi, penyuluhan, pelatihan.
3. **Layanan Pendukung** adalah proses atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, misalnya sistem kepegawaian, keuangan, pengadaan.
4. **Teknologi dan IT Governance** adalah tulang punggung penyelenggaraan layanan berbasis pengetahuan. Infrastruktur TI tidak hanya berupa media komunikasi atau jaringan komputer, namun juga termasuk di dalamnya *platform*, sistem operasi, fasilitas pengamanan, manajemen identitas, akses, otentikasi, otorisasi.
5. **Pengelola Layanan TI** adalah lembaga dalam hal ini Badan Informasi Daerah (BID) yang mengoperasikan dan mengelola komponen teknis layanan masyarakat untuk digunakan bersama oleh berbagai instansi (*Shared Services*). Dalam pelaksanaannya, BID bekerjasama dengan unit kerja teknis terkait.
6. **Change Management dan Innovation Group** adalah kelompok di bawah koordinasi Asisten Fasilitasi dan Investasi yang khusus melaksanakan kegiatan inovasi, transformasi layanan dan menjadi agen perubahan (*change agent*). Kelompok ini terdiri dari (1) Kelompok *Change Management* yang melaksanakan kegiatan komunikasi, *awareness*, persuasi kepada unit kerja terkait untuk mengimplementasikan hasil kegiatan Kelompok *Innovation* dan (2) Kelompok *Innovation* yang terus menerus berinovasi pada area-area Kebijakan, Perundangan, Standar dan Pengukuran, Proses Bisnis dan Layanan, Teknologi (termasuk di dalamnya adalah inovasi ICT), Sumber Daya (SDM dan Pembiayaan), Implementasi dan Monitoring.
7. **ICT Training Center** sebagai fasilitator kegiatan pelatihan ICT untuk berbagai kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat secara luas dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai pemerintah dan masyarakat dalam berinformasi.

VI. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Prinsip-prinsip Umum

1. Penentuan kebutuhan dilakukan dengan menggunakan *framework* “*Tujuh Lapis Kerangka Keselarasan TI dan Organisasi*”.
2. Layanan TI dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor Kebutuhan, Keandalan dan Biaya.
3. Layanan TI dikembangkan dengan menjaga keseimbangan Kategori inisiatif (*Strategic, High Potential, Operational dan Support*).
4. Kegiatan yang berkenaan dengan TI dilaksanakan dengan mengikuti kaidah Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan dan dilakukan secara iteratif (berulang).
5. Pengembangan layanan TI selalu mengupayakan integrasi sistem dan data.
6. Sedapat mungkin mengurangi kegiatan pengembangan aplikasi sendiri.
7. Seluas-luasnya memberikan pilihan alat dan cara akses bagi pengguna layanan TI (baik internal maupun eksternal).

B. Prinsip-prinsip Data dan Informasi

1. Data adalah aset milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat pada saat diperlukan.
3. Data digunakan bersama.
4. Keamanan data dan informasi adalah prioritas utama.
5. Data harus diproduksi secara masal dan terus menerus.
6. Analisa data adalah kegiatan rutin.
7. Data merupakan representasi kegiatan instansi/unit kerja.
8. Data dikelola oleh instansi namun dalam satu koordinasi yang terpusat.
9. Pengelolaan data dilakukan secara fokus (bukan *ad-hoc*).
10. Menggunakan *Relational Database Management System (RDBMS)*.

C. Prinsip-prinsip Keamanan

1. Aset TI beserta seluruh komponen teknologi dan data/informasi harus mendapat perlindungan yang memadai sesuai nilai aset dan potensi resiko.
2. Keamanan mencakup Kerahasiaan (*Confidentiality*), Keterpaduan (*Integrity*) dan Ketersediaan (*Availability*).
3. Pengamanan aset dilakukan sesuai dengan potensi kerugian.
4. Pengamanan aset dilakukan sesuai dengan nilai aset.
5. Pendidikan dan pengarahan mengenai keamanan harus dilakukan secara terus menerus.
6. Identitas pengguna adalah rahasia.
7. Kebijakan keamanan dikelola secara terpusat.
8. Seluruh upaya pengamanan mengacu pada standar *industry ISO17799:2005*.

D. Prinsip-prinsip Aplikasi

1. Sistem Aplikasi atau Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dikembangkan berdasarkan prioritas kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kebutuhan aplikasi didefinisikan oleh pemilik proses sedangkan unit kerja TI bertindak sebagai fasilitator.
3. Aplikasi dikembangkan secara modular.
4. Melakukan rekayasa ulang proses kerja jika diperlukan dan dimungkinkan.
5. Aplikasi dikembangkan berbasis Web dan *Client/Server*.
6. Aplikasi dikembangkan dengan semaksimal mungkin mengurangi kegiatan pembuatan komponen baru.
7. Standar arsitektur aplikasi dan pilihan teknologinya direncanakan secara terpusat.
8. Aplikasi dikembangkan dengan mengacu pada teknologi dan standard industri yang digunakan secara luas.
9. Aplikasi yang dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip keamanan.

E. Prinsip-prinsip Ifrastruktur

1. Infrastruktur TI Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola secara terpusat dan semaksimal mungkin digunakan bersama.
2. Kebutuhan infrastruktur dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan, karakteristik aplikasi dan prakiraan kebutuhan masa depan.
3. Infrastruktur TI fisik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Intranet, Ekstranet dan Internet.
4. Infrastruktur TI diselenggarakan untuk memenuhi kepentingan organisasi.
5. Hak akses penggunaan infrastruktur dikendalikan secara terpusat.
6. TCP/IP sebagai standar protokol komunikasi data.
7. Standar arsitektur infrastruktur dan pilihan teknologinya direncanakan secara terpusat.
8. Infrastruktur dikembangkan dengan mengacu pada teknologi dan standard industri yang digunakan secara luas.
9. Infrastruktur yang dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip keamanan.

VII. PENUTUP

Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan masyarakat demikian cepatnya, maka implementasi *Blueprint Jogja Cyber Province* ini diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat sepanjang tidak menyimpang dari visi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

HAMENGGU BUWONO X